

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Sikap pemimpin politik harus menunjukkan sikap yang baik agar dapat ditiru oleh rakyat yang dipimpinnya. Secara khusus, ketika menetapkan aturan dan kebijakan, UUD 1945 bagi pemerintah atau elit politik untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.

Soeharto lahir pada tanggal 8 Juni 1921 di Kemusuk, Argomulyo, Yogyakarta. Soeharto lahir dari pasangan bernama Kertosudiro, juga dikenal sebagai Panjang dan Sukirah. Ayahnya adalah seorang petani dan asisten kepala desa yang mengairi sawah desa (ulu-ulu). Sekitar tahun 1939, Soeharto dipanggil untuk dua pekerjaan. Satu dari tentara dan yang lainnya dari bank. Setelah itu, Soeharto lebih memilih berkarir di ketentaraan. Karir militer Soeharto dimulai pada 1 Juni 1940, ketika ia menjadi anggota tentara Belanda di Hindia, KNIL (*Koninklijk Nederlandsch Indien Leger*). Pada usia 19 tahun, Soeharto menerima pelatihan militer di KNIL, kemudian pada tanggal 5 Oktober 1945, Soeharto resmi menjadi anggota ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) dan ikut serta dalam pertempuran dengan Belanda untuk kemerdekaan

Indonesia. Namanya mulai dikenal luas karena perannya dalam penyerangan ke Yogyakarta pada 1 Maret 1949.<sup>1</sup>

Pada tahun 1961, Soeharto menjadi Brigadir Jenderal dan memimpin Komando Mandala yang bertugas menaklukkan Irian Barat. Hal terpenting yang diperoleh Soeharto selama periode ini adalah Kolonel Sudomo, Mayor Ali Murtopo, dan Kapten L.B. Moerdani yang kemudian menjadi tokoh terpenting dan strategis dalam pemerintahan orde baru. Pada tahun 1965, kebijakan Nasakom (nasionalisme, agama, komunisme) yang diprakarsai oleh Presiden Sukarno menyebabkan militer terjerumus ke dalam konflik internal. Akibatnya, tentara terpecah menjadi dua faksi: faksi kiri dan faksi kanan.

Soeharto dianggap sebagai orang penelitip kanan. Soeharto menanggapi kasus G30S untuk mengamankan Jakarta tak lama setelah menerima kabar bahwa Menteri/Panglima Angkatan Darat, Letnan Ahmad Yani, tidak diketahui. Dengan tidak adanya Panglima Angkatan Darat, Panglima Costrad akan menjalankan tugasnya sesuai dengan kebiasaan Angkatan Darat. Tindakan ini mengeluarkan surat perintah penangkapan yang dikenal sebagai "Perintah 11 Maret" (Super Semar) oleh Presiden Sukarno, yang memberi wewenang kepada Soeharto untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Soeharto kemudian mengambil langkah untuk segera membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI),

---

<sup>1</sup> Sukoco Hendarto, *PENGARUH BUDAYA JAWA DALAM KEKUASAAN POLITIK SOEHARTO* (Jakarta Selatan, 2020).

meskipun mendapat tentangan dari Presiden Sukarno dan penangkapan sejumlah menteri yang diduga terlibat dalam G30S.<sup>2</sup>

Beberapa tahun kemudian, Soeharto menjadi Letnan Kolonel (*Everste*) dan bertugas di Yogyakarta. Pada tahun yang sama, ia menikah dengan teman sekelas saudara perempuan Soeharto, Siti Hartinah. Soeharto menikah di Solo pada 26 Desember 1947. Soeharto menikah pada usia 26 tahun dan Hartinah pada usia 24 tahun. Sepasang suami-istri ini dikaruniai enam putra dan putri; Siti Hardiyanti Hastuti, Sigit Harjojudanto, Bambang Trihatmodjo, Siti Hediati Herijadi, Hutomo Mandala Putra, dan Siti Hutami Endang Adiningsih.<sup>3</sup>

Soeharto adalah pemimpin yang mengesankan dengan stabilitas strategis. Dengan kepemimpinannya, ia juga berhasil menciptakan negara politik yang stabil. Sesuai dengan latar belakang filosofi dan budaya Jawanya, tujuan akhir kepemimpinan Soeharto bagi rakyat Indonesia adalah keadaan damai dan aman. Artinya, sesuai amanat Pancasila dan UUD 1945, segala kemakmuran dan kemakmuran hanya akan sampai kepada rakyat Indonesia.

Secara pribadi, Soeharto adalah pemimpin yang mampu menstabilkan perekonomian negara dengan kuat. Pembangunan dilanjutkan dengan rencana yang lengkap, dan secara bertahap, Soeharto menekankan konsepnya yang terkenal: trilogi

---

<sup>2</sup> Hendarto.

<sup>3</sup> Yuanita Rusalia Harneni, 'TINJAUAN ISLAM TENTANG ETIKA POLITIK SOEHARTO' (UIN Syarif Hidayatullah, 2009).

pembangunan, pembangunan ekonomi yang kemudian berkeaja. Distribusi yang adil dari stabilitas nasional, pertumbuhan ekonomi dan hasil pembangunan yang termasuk dalam GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara).<sup>4</sup>

Upaya implementasi konsep-konsep dasar pembangunan masyarakat umumnya dilakukan dengan menghilangkan perbedaan ideologi antara kelompok masyarakat yang berbeda, dan tindakan politik rakyat semua kekuatan politik bertentangan dengan kesatuan ideologi Pancasila dengan berpedoman pada prinsip kesetiaan. Dikembangkan sebagai pengamalan Pancasila pada saat dikeluarkan. Bertujuan untuk membangun masyarakat maju yang sejalan dengan falsafah perjuangan bangsa, bukan masyarakat maju yang bertentangan dengan falsafah perjuangan nasional.

Satu-satunya prinsip adalah memperkuat Pancasila. Soeharto telah membangun hubungan yang positif dan kreatif selama kehidupan keagamaannya. Keyakinan dalam kehidupan bermasyarakat sebagai bangsa berpedoman pada keyakinan masing-masing agama berdasarkan Pancasila. Sebagai pengamalan Pancasila, membangun landasan moral, etika, dan spiritual yang kokoh bagi pembangunan nasional. Untuk dapat secara damai menjalin kerukunan antar kaum pagan, itu adalah bagian dari kemajemukan negara dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Dari seluruh Presiden Indonesia pastinya memiliki keyakinan agama yang kuat untuk memimpin sebuah negara yang mana mayoritas islam dan sejauh ini juga

---

<sup>4</sup> Miftah H. Yusufpati, *H.M. Soeharto Membangun Citra Islam*, Cetakan 2 (Jakarta: Jakarta : AsiaMark, 2007).

masyarakat tidak akan menerima pemimpin negara beragama lain. Agama ini juga yang yang memperkuat dan perdalam rasa nasionalis para presiden untuk mengabdikan kepada bangsa dan negara.

Dalam terminologi ensiklopedia nasional Indonesia, agama diartikan sebagai aturan atau tata cara yang mengatur kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Tuhan dan sesama. Dalam Al-Qur'an, agama sering disebut *Din*. Istilah tersebut memiliki arti umum dan universal karena merupakan istilah yang berasal dari ajaran Islam. Artinya, konsep yang terkandung dalam istilah *din* harus mencakup makna yang terkandung dalam istilah agama dan agama.<sup>5</sup>

Pada masa-masa awal orde baru, Soeharto mendekati Islam untuk memperoleh Islam. Soeharto dan Islam turut menumpas Partai Komunis Indonesia (PKI) di seluruh wilayah Indonesia. Namun, dari tahun 1966 hingga 1981, setelah pemerintahan (Orba) kokoh, Soeharto perlahan meninggalkan Islam dan menentang Islam. Hal ini karena orde baru atau yang sering disebut dengan "era pembangunan" berorientasi pada pembangunan dan terlalu menekankan pada pertumbuhan ekonomi yang membutuhkan stabilitas politik. Soeharto menganggap berbagai ideologi dan agama, khususnya Islam yang bersifat politis, sebagai ancaman mutlak bagi ketidakstabilan politik yang akan mengancam sistem orde barunya. Tak heran jika Soeharto memberlakukan sistem manajemen Islam yang ketat.

---

<sup>5</sup> Harneni.

Pandangan ekstrim terhadap politik Islam Soeharto dapat ditemukan pada beberapa kebijakan Soeharto yang dinilai sangat merugikan Islam. Misalnya, kegagalan pembentukan Partai Demokrasi Islam Indonesia (PDII), pembentukan Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) dan Partai Muslim Indonesia (Parmusi) Masalah agama, tagihan perkawinan dan perjudian, penghapusan hari libur sekolah selama bulan Puasa (Ramadhan) siswa sekolah dilarang mengenakan hijab dilarang Soeharto dan pembatasan kegiatan masjid kampus baru meningkat.<sup>6</sup>

Menolak demokrasi barat, Soeharto memperkenalkan demokrasi Pancasila dengan mendirikan sistem pemerintahannya yang dikenal sebagai demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang menerima dan menyerap budaya negara Indonesia dan agama rakyatnya. Kelangsungan hidup Soeharto adalah bahwa Pancasila adalah upaya untuk memperkuat negara yang kuat.<sup>7</sup> Sebagai sebuah negara demokrasi, keberadaan politik di Indonesia merupakan suatu keharusan, karena keberadaannya merupakan cermin dari nilai demokrasi. Sebagai seorang aktifis politik, Soeharto tentu sangat dipengaruhi oleh pemikiran Islam, bahkan sangat mungkin sekali bahwa Islam telah ikut munculnya Ideologi Pancasila.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Siti Maesaroh, 'SIKAP POLITIK SOEHARTO TERHADAP ISLAM 1986-1998 M' (UIN Sunan Kalijaga, 2008).

<sup>7</sup> G., Nazarudin Sjamsudin Dwipayana, *Jejak Langkah Pak Harto 1 Oktober 1965 - 27 Maret 1968* (Jakarta: PT. Citra Lamtoro Agung, 1991).

<sup>8</sup> Retnowati, Knapp Abdulgani, *Soeharto The Life and Legacy of Indonesia's Second President* (Jakarta: Hasta Pustaka, 2007).

Depolitisasi Islam ditangani oleh aturan-aturan politik. Proses ini melibatkan penghapusan simbol islam dari aktivitas politik, penghapusan partai politik Islam, dan pembersihan wilayah politik politisi muslim. Depolitisasi Islam membuat semua partai Islam yang ada menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada tahun 1973, baik dari segi sarana politik maupun dari segi komitmen mereka untuk mengadopsi Pancasila dari segi ideologi politik. Sebagai asas yang dipersatukan oleh semua partai politik dan ormas pada tahun 1985.<sup>9</sup>

Depolitisasi Islam merupakan bagian dari rencana yang lebih besar, yaitu depolitisasi umat secara umum. Hal ini tercermin dalam penciptaan populasi massa mengambang yang mendepolitisasi akar rumput dan menjauhkan para pemimpin politik dari pendukung mereka. Menyusul menyusutnya parpol, diikuti oleh Golongan Karya (Golkar), PPP dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Seperti yang dikatakan Nacil Tamara, cerita di balik pembentukan PPP tidak sederhana, tetapi partai-partai Islam menanggapi pengurangan ini secara relatif "sederhana".

Sejak awal, NU adalah anggota partai politik Islam terbesar. Awalnya kurang tertarik untuk berpartisipasi, NU akhirnya bergabung dengan merger tanpa konflik internal. Sementara itu, terjadi gejolak di dalam Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), yang menyebabkan perubahan kepemimpinan yang dimenangkan oleh kaum merger.

---

<sup>9</sup> Masykur Hakim, 'SOEHARTO AND THE POLITICIZATION OF INDONESIAN ISLAM (1968-1998)', Volume 10, Number 02 (2016).

Sementara itu, Partai Muslim Indonesia (Parmusi) dan Persatuan Tarbiah Islamiyah (Perti) mendukung merger cepat sejak awal.<sup>10</sup> “Respons yang sederhana dan cepat” ini sebagian disebabkan oleh logika kontekstual politik saat itu, dengan partai politik mengikuti arus manipulasi politik dan sebagian lagi bertindak sebagai pendukung pertama pemerintahan.

Mintaredja (ketua Parmusi dan kemudian Presiden PPP) dalam refleksinya tentang Islam dan Pancasila menilai bahwa Islam tidak bertujuan untuk mendirikan negara Islam karena pada masa Nabi Muhammad, istilah "negara" di rasa negara hari ini belum ada. Dalam pandangan Mintaredja, tugas utama umat Islam adalah berjuang untuk menciptakan masyarakat Muslim sejati yang harus dibedakan dari negara Islam. Masyarakat Muslim dapat secara sah bernegara tanpa merusak integritasnya sebagai negara-bangsa. Tentang hubungan Islam dan politik, Mintaredja meyakini karakter Islam yang totalistik sebagai *way of life*, termasuk kehidupan politik. Politik bersifat duniawi dan pendekatan terhadap masalah politik harus sesuai dengan sifatnya.

---

<sup>10</sup> Muhammad Akmal Hassan, *Muslim Intellectual Responses to "New Order" Modernization in Indonesia* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1980).

Mencermati permasalahan Islam Indonesia, yang terletak pada paradoks antara kekalahan Islam yang dipolitisasi dan ekspansinya yang pesat. Nurcholish Madjid sampai pada kesimpulan bahwa pertumbuhan kuantitatif Islam tidak didorong oleh partai-partai Islam atau ormas Islam, karena partai-partai Islam telah gagal membangun citra Islam yang positif dan simpatik.<sup>11</sup>

Prinsip karakteristik partai dianggap sebagai penyebab polarisasi, yang pada akhirnya dapat menimbulkan kecemasan akibat fanatisme kolektif. Solidaritas kelompok begitu kuat sehingga fanatisme kelompok mengarah pada sikap ekstrim terhadap kelompok lain yang tidak memiliki keinginan yang sama.

Menurut Soeharto, penyatuan prinsip harus mengurangi fanatisme massa di daerah-daerah kecil untuk mencapai stabilitas politik dalam konteks pembangunan bangsa. Pancasila adalah jiwa bangsa Indonesia. Oleh karena itu, upaya untuk merampoknya dari negara ini menghadapi perlawanan besar dan gagal.

Perlakuan ini harus menghormati hak asasi manusia sesuai dengan kewajibannya. Oleh karena itu, keselarasan hak dan kewajiban merupakan perwujudan kemanusiaan yang adil dan beradab. Berdasarkan fakta ini, Soeharto melihat bahwa pandangan kemanusiaan Indonesia tidak ingin orang lain menindas manusia, baik secara fisik maupun mental. Berdasarkan prinsip ini, kemerdekaan adalah hak semua bangsa, yang tidak mentaati kemanusiaan dan keadilan, sehingga penjajahan dunia

---

<sup>11</sup> Hakim.

harus dihapuskan. Itulah alasan untuk menolak rasisme. Karena keinginan kita adalah kebahagiaan individu, yang dicapai semata-mata dengan kebahagiaan, tanpa menyakiti orang lain.<sup>12</sup>

Reaksi Islam ketika orde baru muncul mengikuti tiga pola. *Pertama*, pola apiodia, kemudian upaya beradaptasi dan beradaptasi dengan modernisasi. *Kedua*, mereka juga meminta maaf atas ajaran Islam, tetapi menolak modernisasi, yang dipandang sebagai westernisasi dan sekularisasi. *Ketiga*, pola respon kreatif yang mengikuti jalur interaktif yang mengutamakan pendekatan intelektual dalam merespon modernisasi.<sup>13</sup>

Di sisi lain, ada beberapa penyebab ketidaksepakatan antara pemerintah dan Islam di awal perjalanan Orde Baru. *Pertama*, Islam sangat meyakini demokrasi. *Kedua*, karena Islam merupakan mayoritas penduduk Indonesia, mekanisme pemerintahan negara yang demokratis mendominasi kehidupan politik Islam dan mewujudkan nilai-nilai Islam dalam segala aspek kehidupan politik. *Ketiga*, karena sebagian umat Islam menafsirkan Islam secara harafiah/ketat, maka proses pengungkapan yang jelas sering kali kasar dan menimbulkan konflik-konflik primitif.

*Keempat*, Kahar Muzakkar dan Daud Beureu cenderung kurang positif dan curiga terhadap sisi Islam paling kanan, terutama di militer, karena pengalaman masa

---

<sup>12</sup> Gatut Priyowidodo, *KOMUNIKASI POLITIK: (Memahami Dari Sisi Kepribadian Dan Pemikiran Politik Soekarno Dan Soeharto)* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018).

<sup>13</sup> Okrisal Eka Putra, 'HUBUNGAN ISLAM DAN POLITIK MASA ORDE BAKU', Vol.IX No. 2 (2008).

lalu mereka yang sangat traumatis dengan DI/TII, bahkan ada. *Kelima*, karakteristik pemerintahan otoriter yang memilih membentuk bentuk politik baru, terutama pada masa transisi dari orde lama ke orde baru.<sup>14</sup>

Peran Islam politik dalam sejarah Indonesia mengalami pasang surut, sejak kemerdekaan hingga saat ini. Hubungan Islam dan politik di Indonesia seperti gula dan manisnya, keduanya tidak dapat dipisahkan. Jika kita dapat memisahkan gula dari manisnya, kita dapat memisahkan Islam dari politik<sup>15</sup>. Penjelasan ini didasarkan pada kenyataan bahwa Islam menempati posisi yang sangat berpengaruh dalam masyarakat Indonesia. Islam, serta Islam sebagai agama mayoritas masyarakat Muslim, menjalankan kontribusi utama dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Saat orde baru berkuasa, kekuatan Islam mulai berkurang. Politik Islam tidak lagi menjalankan kontribusi sentral karena kelompok dan partai Islam didepolitikasi.

Sebelum lahirnya ICMI di masa awal Orde Baru pada pertengahan 1980-an, Islam tidak memiliki tempat yang layak dalam proses politik, sehingga menyebabkan depolitikasi Islam. Seiring dengan membaiknya hubungan pemerintah dengan komunitas Muslim, pemerintah merekrut kaum intelektual Muslim ke dalam kepemimpinan politik dan birokrasi Orde Baru.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Putra.

<sup>15</sup> 'Deskripsi Tersebut Di Kemukakan Oleh KH. Wahab Chasbullah, Seorang Tokoh Terkemuka Dalam Gerakan Nahdatul Ulama Pada Tahun 1950-an Suatu Periode Ketika Politik Masa Sedang Berada Di Puncak Ketinggiannya'.

<sup>16</sup> Adian Husaini, *Habibie, Soeharto Dan Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).

Pada saat yang sama, tahun 1980-an dan 1990-an merupakan masa “panen” atau ledakan intelektual Muslim dari berbagai gerakan<sup>17</sup>. Mengisi lapisan birokrasi, dunia kampus, dunia usaha dan institusi masyarakat. Dari mereka muncul *Critical Mass*<sup>18</sup>, yang bereaksi terhadap dinamika dan proses pembangunan di negara dan negara bagian.<sup>19</sup> Hal ini pula yang memunculkan ide untuk mendirikan ICMI.

Ide pendirian ICMI digagas oleh sejumlah mahasiswa teknik dan aktivis spiritual Islam di Masjid Raden Fatah Universitas Brawijaya. Kelima mahasiswa tersebut antara lain Eric Salman, Ali Muzakir, Muhammad Zenuri, Awan Surya dan Mohammad Iqbal. Saat itu, mahasiswa melihat situasi umat Islam dan khawatir seolah-olah ada polarisasi dalam kepemimpinan umat. Paramadina di Jakarta, Salman di Bandung, Salahuddin di Yogyakarta, Surabaya punya Al Falah. Setiap orang menegaskan diri dan tidak sejalan dengan wadah, sehingga hasil pemikiran yang direalisasikan tidak terkonsolidasi.



---

<sup>17</sup> Yudi Latif, *Inteligensia Muslim Dan Kuasa: Genealogi Inteligencia Muslim Indonesia Abad Ke20* (Bandung: Mizan, 2005).

<sup>18</sup> ‘Dalam Kamus Bahasa Inggris Critical’ Berarti Krisis/Genting, Sedangkan MassArtinya Massa (Banyak Sekali). Sehingga Critical Mass Dapat Diartikan Sebagai Kelompok Warga Negara Yang Mampu Mengentaskan Negara Dari Keterpurukan Atau Masa Kritis Menuju’.

<sup>19</sup> *Pertanggungjawaban Majelis Pengurus ICMI Orwil Jawa Timut Periode 1995-2000, Kelahiran, Misi Dan Model Pendekatan ICMI Se Indonesia.*

Mereka bertemu dengan beberapa cendekiawan Muslim terkemuka, termasuk Imaduddin Abdulrahim dan Dawam Rajo, yang menggerakkan para mahasiswa dari sekadar menyelenggarakan simposium menjadi mendirikan asosiasi Cendekiawan Muslim nasional<sup>20</sup>. Habibie menyarankan untuk memperluas gagasan tersebut.<sup>21</sup>

Potret atau profil mengalami pergeseran semantik dalam perkembangannya. Akademisi dilembagakan dalam perkembangannya, intelektual menjadi politik, dan intelektual dapat menjadi bagian dari kelompok. Akhirnya, posisi intelektual memiliki peran multifungsi dan bergeser, sering disebut sebagai "lengan panjang" kekuasaan.<sup>22</sup> Meski tergolong gerakan sosial budaya, namun lebih sering dilihat dari perspektif politik.

ICMI secara resmi diluncurkan pada tanggal 6 Desember 1990 dengan dibukanya simposium nasional yang diadakan di kota Malang. Simposium ini dibuka oleh Soeharto, Presiden Republik Indonesia. Pembentukan ICMI yang didukung penuh oleh pemerintahan Soeharto, mengubah pemahaman para pengamat tentang Indonesia, yang awalnya memandang Soeharto sebagai seorang *abangan* dengan sedikit minat pada Islam, tetapi kemudian menjadi salah satu pendukung utama Islam. Sebuah

---

<sup>20</sup> Robert W Hefner, *Islam State, and Civil Society ICMI and The Struggle for The Indonesian Middle Class, Pengantar Emha Ainun Najib Dengan Judul ICMI & Perjuangan Menuju Kelas Menengah Indonesia* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1995).

<sup>21</sup> Konon Nama ICMI Itu Diilhami Oleh Judul Makalah Nurcholish Madjid Yang Berjudul ISMI Yakni Ikatan Sarjana Muslim Indonesia. Namun Oleh B.J. Habibie S (Sarjana) Nya Diganti Dengan C (Cendekiawan) Supaya Mencakup Juga Orang-Orang Yang Tidak Mempunyai Titel (Jakarta: Amanah Putra Nusantara, 1995).

<sup>22</sup> Ahmad Bahar, *Biografi Cendekiawan Politik; Amin Rais Gagasan Dan Pemikiran Menggapai Masa Depan Indonesia Baru* (Yogyakarta: Pena Cendekia, 1998).

organisasi yang justru memperdalam proses Islamisasi di masyarakat Indonesia.<sup>23</sup> Langkah Soeharto juga menandakan bahwa ia mulai meninggalkan prinsip-prinsip non-rahasia yang telah ditempa selama lebih dari dua dekade sejak Orde Baru berkuasa.<sup>24</sup>

Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia lahir dalam suasana tumbuhnya kesadaran beragama di kalangan umat Islam dan melemahnya pemerintahan Orde Baru dengan kebangkitan Islam. Tumbuhnya kesadaran beragama di kalangan umat Islam telah mengakibatkan meningkatnya jumlah peziarah, meluasnya pemakaian jilbab di kalangan gadis dan wanita Muslim, kegembiraan membaca tilawah di kampus-kampus universitas sekuler, dan munculnya organisasi massa Islam seperti NU, Muhammadiyah, munculnya Lembaga-Lembaga Islam, lembaga-lembaga baru untuk kajian Islam seperti Yayasan Wakaf Paramadina dan Lembaga Studi dan Filsafat Agama (LSAF).

Lebih penting lagi adalah semangat kehidupan keagamaan pemerintah dan swasta, yang ditandai dengan salat Jumat, salat Idul Fitri, salat Tarawih, acara peringatan hari besar Islam.<sup>25</sup> Namun lahirnya ICMI bukan tanpa hambatan. Hambatan teknis dan pemikiran sering menghalangi ICMI untuk mempersiapkan kelahirannya.

---

<sup>23</sup> 'Abangan Salah Satu Dari Tiga Kategori Yang Dimunculkan Oleh Clifford Geert: Untuk Merujuk Pada Muslim Yang Kurang Memiliki Kedekatan Pada Agama Islam Yang Mereka Peluk. Sebaliknya Kelompok Ini Lebih Menekankan Pada Praktek-Praktek Agama Hindu-Budha Atau A'.

<sup>24</sup> Menurut Hefner, *Perubahan Sikap Soeharto Yang Cukup Drastis Ini Yang Terjadi Hanya Dalam Hitungan Tahun Merupakan Pertanyaan Besar Yang Harus Dijawab. Kisah Tentang Lima Orang Mahasiswa Yang Menginginkan Terbentuknya LCMi Di Level Nasional Merupakan Simpli.*

<sup>25</sup> Sudirman Tebba, *Islam Pasca Orde Baru* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yoga, 2001).

Berbagai kritik anti ICMI telah dilontarkan oleh berbagai partai politik, mulai dari isu rekayasa politik hingga isu primitivisme terhadap ICMI. Bahkan diduga akan menjadi kepanjangan tangan pemerintah dan akan menjadi lembaga yang kontra produktif bagi pembangunan.<sup>26</sup>

Sebab, banyak petinggi ICMI yang terlibat dalam aktivisme politik yang sesungguhnya. Meski tidak memakai "baju" organisasi atau menekuni aktivisme politik secara langsung, sebagian melihat mereka sebagai "jejak dan prestasi" politik ICMI. Penggeraknya semakin tercermin pada sosok Prof Bachrudin Jusuf Habibie, Presiden ICMI. Dengan demikian, setiap tindakan yang dilakukannya akan selalu mempengaruhi, atau setidaknya selalu mengatasnamakan ICMI.<sup>27</sup> Apa yang dilihat oleh komentator politik sebagai kesetiaan Senayan kepada kabinet yang di reformasi.



---

<sup>26</sup> Makmuf dan Dhurorudin Mashad Makka, *ICMI: Dinamika Politik Islam Di Indonesia* (Jakarta: Pustaka CIDESINDO, 1996).

<sup>27</sup> Makmuf dan Dhurorudin Mashad Makka, *ICMI: Dinamika Politik Islam Di Indonesia* (Jakarta: Pustaka CIDESINDO, 1996).

Untuk membangun sesuatu perubahan positif tentunya harus mengisi peran yang berkualitas dan tentunya banyak dicintai rakyat. Misalnya Habibie, karena kecakapannya terhadap iptek dan imtak mampu merebut hati rakyat apalagi masyarakat muslim. Habibie adalah citra yang menggabungkan sains dan teknologi dengan Imtak, membuatnya lebih diterima dan lebih dekat dengan Muslim modernis perkotaan. Setidaknya Habibie bisa mendapatkan dukungan politik dari kelompok-kelompok tersebut.<sup>28</sup>

Soeharto memahami situasi dengan baik. Pada saat yang sama, pada awal 1990-an, Soeharto mulai mengatasi ketergantungan dan ketidakpercayaannya pada militer. Habibie dan Soeharto mulai mencari kelompok-kelompok yang dia abaikan Islam Modernis Perkotaan. Merle Calvin Ricklefs dalam *Mengislamkan Jawa*<sup>29</sup> menyatakan Orde Baru pada 1980-an dan 1990-an cenderung mencari dukungan dari komunitas Islam. Perkembangan ini menimbulkan sejumlah konsesi, di antaranya penguatan pendidikan agama Islam di sekolah.

Soeharto kemudian melakukan pendirian Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) sebagai sarana intelektual Muslim perkotaan. Bahkan, saat diminta menjadi ketua ICMI, Habibie tidak setuju. Pada tahun 1990, ia didekati oleh

---

<sup>28</sup> Indira Ardanaeswari, 'BJ Habibie Dan ICMI: Jembatan Soeharto Meraih Dukungan Umat Islam', *Tirto.id*, 2019 <<https://tirto.id/bj-habibie-dan-icmi-jembatan-soeharto-meraih-dukungan-umat-islam-eh24>>.

<sup>29</sup> Merle Calvin Ricklefs, *Mengislamkan Jawa: Sejarah Islamisasi Di Jawa Dan Penentangannya Dari 1930 Sampai Sekarang* (Jakarta: Serambi, 2013).

sekelompok mahasiswa dan akademisi Malang dan diminta untuk menjadi ketua ICMI. Penelitiannya, Habibie terus mengelak.

Meski dikabarkan skeptis menerima niat baik mahasiswa, persetujuan Soeharto atas pembentukan ICMI membuka jalan bagi Habibie untuk menjadi presiden. Lebih dari 49 cendekiawan Muslim dari seluruh Jawa mampu menyatakan dukungannya terhadap penunjukan Habibie sebagai Presiden ICMI. Surat ini kemudian disetujui oleh Soeharto pada Januari 1991.

Menurut A. Makmur Makka, Habibie diangkat oleh beberapa cendekiawan Muslim Malang sebagai Rektor Jenderal karena beberapa alasan. *Pertama*, prestasi dan dedikasi Habibie sebagai cendekiawan muslim memang tak terbantahkan. *Kedua*, reputasinya yang tinggi di bidang politik dan akademik sudah dikenal masyarakat luas.<sup>30</sup>

Soeharto terkenal dengan sikap skeptisnya tentang islam modern dan ajarannya. Tak heran, jika banyaknya masyarakat bahkan elit politik mempertanyakan apa sebenarnya yang mendasarinya untuk menyetujui pendirian ICMI hingga aturan syariat islam yang lainnya.

Dua puluh lima tahun setelah menjabat, sikapnya masih berubah sedikit demi sedikit. Dia tidak hanya mendukung berdirinya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang dipimpin oleh BJ Habibie, pada tahun 1990, tetapi dia juga mulai

---

<sup>30</sup> Ardanareswari.

mempermudah pengenalan jilbab di sekolah-sekolah. Pada Juni 1991, Soeharto bahkan mengumumkan bahwa ia dan keluarganya akan menunaikan rukun Islam yang kelima. Setelah itu, pemikirannya Soeharto mengubah politik dan konstelasi politik negara.

Sudah terlihat anti-Muslim, kebijakan Soeharto perlahan mulai menguasai masyarakat Islam. Antara lain, Soeharto membantu mendirikan Bank Muamalat yang menerapkan sistem Syariah, dan Yayasan Amar Bhakti Muslim Pancasila dalam membangun ratusan masjid di semua daerah.<sup>31</sup>

Dapat disimpulkan bahwa Soeharto melihat kekuatan politik Islam tumbuh dan mempengaruhi kekuasaan. Demi kepentingan politiknya di masa depan, Soeharto merasa harus memperbaiki kekuatan Islam yang semakin besar.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan seluruh substansi yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah, maka dapat dilihat bahwa Soeharto memang memiliki jiwa dan ambisi militer yang tinggi dilihat dari dampak-dampak kebijakan yang beliau ciptakan untuk menyelesaikan permasalahan pada masanya, hal ini menyebabkan terciptanya sikap otoriter yang masyarakat rasakan terutama masyarakat yang beragama Islam merasakan sekali penindasan yang dibuatnya. Namun, setelah kesadarannya untuk pergi ke tanah suci untuk ibadah haji, setelah itulah pengenduran sikap otoritasnya

---

<sup>31</sup> Sudrajat, 'Ketika Soeharto Kian Mesra Dengan Islam Setelah Naik Haji', *News.Detik.Com*, 2017 <<https://news.detik.com/berita/d-3624700/ketika-soeharto-kian-mesra-dengan-islam-setelah-naik-haji>>.

terlihat dari mulai berdirinya ICMI hingga aturan syariat yang lainnya. Dari rumusan masalah tersebut dibentuklah pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1.2.1 Bagaimana politik Islam Soeharto merespons kelahiran Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia?

1.2.2 Faktor apa yang merubah politik islam Soeharto ?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Sebagaimana diketahui bahwa semua upaya kita memiliki tujuan, seperti halnya menyusun skripsi memiliki tujuan:

1.3.1.1 Untuk mengetahui bagaimana respon Soeharto atas berdirinya ICMI dalam pemerintahannya

1.3.1.2 Untuk mengetahui faktor apa yang mendasari politik Islam Soeharto

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

##### **1.3.2.1 Manfaat Akademis**

Secara akademis, skripsi ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan kontribusi atas pengetahuan tentang Politik Islam Soeharto berkaitan dengan berdirinya ICMI.

### **1.3.2.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis, hasil skripsi ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian lanjutan yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini, serta sebagai prasyarat memperoleh gelar Sarjana dalam program Strata Satu (S-1) pada jurusan Ilmu Politik.

### **1.4 Sistematika Penelitian**

Sistematika penelitian dalam Proposal ini, disusun sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

#### **BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi kajian terdahulu, kerangka teori, dan kerangka pemikiran.

#### **BAB 3 METODE PENELITIAN**

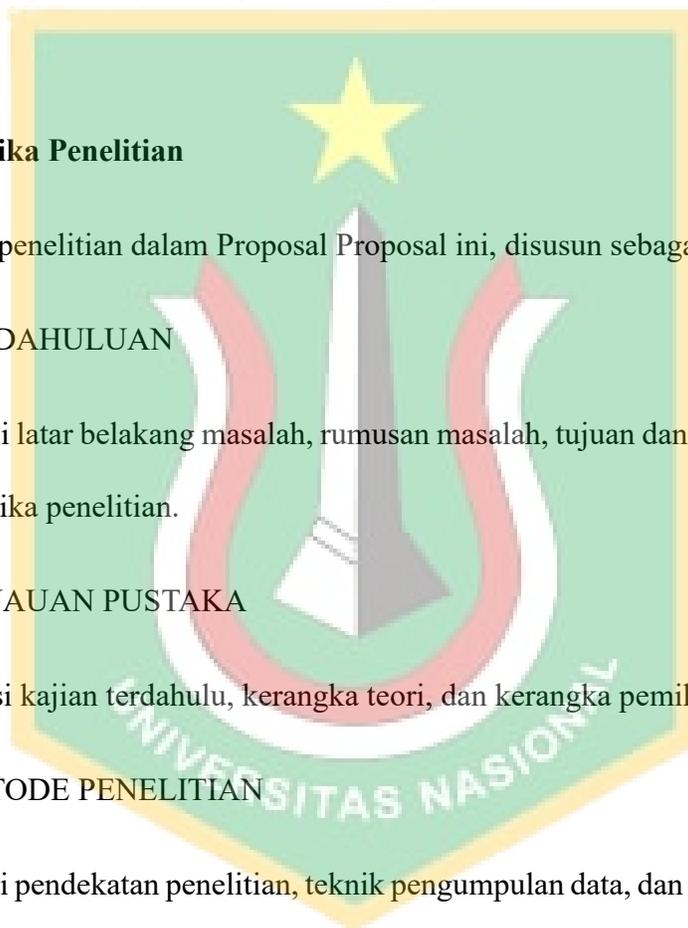
Bab ini berisi pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

#### **BAB 4 DATA KASUS**

Bab ini berisi hasil temuan data yang berhubungan dengan kasus yang dipilih

#### **BAB 5 ANALISIS DATA KASUS**

Bab ini analisis dari data kasus yang disajikan



## BAB 6 PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari seluruh isi proposal skripsi ini dan saran terkait pembahasan

